



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna, telah ditetapkan kodefikasi lokasi dan barang daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 474 Ayat 1, Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang, dan Ayat 2, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu disesuaikan dengan nomenklatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2014 Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 4250);
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 33);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV, Pasal 4 ayat (5), diubah sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

ayat (5) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 30 bidang, dimana 22 bidang merupakan bidang-bidang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan 13 lainnya adalah bidang tambahan yang belum terakomodir, bidang-bidang tersebut yaitu :

- a. Sekwan/ DPRD adalah nomor 1;
- b. Walikota adalah nomor 2;
- c. Wakil Walikota adalah nomor 3;
- d. Sekretariat Daerah adalah nomor 4;
- e. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah nomor 5;
- f. Bidang Perhubungan adalah nomor 6;
- g. Bidang Kesehatan adalah nomor 7;
- h. Bidang Pendidikan adalah nomor 8;
- i. Bidang Sosial adalah nomor 9;
- j. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah nomor 10;
- k. Bidang Ketahanan Pangan Dan Pertanian adalah nomor 11;
- l. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan adalah nomor 12;
- m. Bidang Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah nomor 13;
- n. Bidang Inspektorat adalah nomor 14;
- o. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah nomor 15;
- p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor 16;
- q. Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata adalah nomor 17;
- r. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah nomor 18;
- s. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah nomor 19;



- t. Bidang Penghubungan adalah nomor 20;
- u. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan adalah nomor 21;
- v. Bidang BUMD adalah nomor 22;
- w. Bidang Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah nomor 23;
- x. Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman adalah nomor 24;
- y. Bidang Penanaman Modal Dan PTSP adalah nomor 25;
- z. Bidang Perikanan adalah nomor 26;
- aa. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah nomor 27;
- bb. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah nomor 28;
- cc. Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah nomor 29;
- dd. Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah nomor 30;
- ee. Bidang Rumah Sakit Umum Tipe D adalah nomor 31
- ff. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja adalah nomor 32;
- gg. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah nomor 33;
- hh. Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian adalah nomor 34;
- ii. Bidang Tenaga Kerja adalah nomor 35;
- jj. Kecamatan adalah nomor 50.

2. Ketentuan Bab IV, Pasal 4 ayat (6) dan ayat (10), diubah sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

ayat (6) Nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penjabaran dari bidang tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi pada Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

ayat (10) Nomor kode Sub Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sekaligus nomor kode keberadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	4
KA. SEKSI / Ka. SUB	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya.
pada tanggal 10 November 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,








H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 36

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASIJBAG	
PELAKSANA	



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG KODEFIKASI
 LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

TABEL KODE LOKASI BARANG DAERAH

Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	U r a i a n
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	01	00	00	00	Sekretariat DPRD
12	24	06	01	01	00	00	SOPD Sekretariat DPRD
12	24	06	01	01	00	01	DPRD
12	24	06	01	01	00	02	Bagian Umum Dan Keuangan
12	24	06	01	01	00	03	Bagian Perundang-undangan, Persidangan Dan Humas
12	24	06	01	01	00	04	Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan
12	24	06	02	00	00	00	Walikota
12	24	06	03	00	00	00	Wakil Walikota
12	24	06	04	00	00	00	Sekretariat Daerah
12	24	06	04	01	00	00	SOPD Sekretariat Daerah
12	24	06	04	01	00	01	Asisten Pemerintahan
12	24	06	04	01	00	02	Asisten Ekonomi Pembangunan Dan Kesra
12	24	06	04	01	00	03	Asisten Administrasi Umum
12	24	06	04	01	00	04	Bagian Pemerintahan
12	24	06	04	01	00	05	Bagian Hukum Dan Ham
12	24	06	04	01	00	06	Bagian Organisasi
12	24	06	04	01	00	07	Bagian Ekobang
12	24	06	04	01	00	08	Bagian Layanan Pengadaan
12	24	06	04	01	00	09	Bagian Kesejahteraan Rakyat
12	24	06	04	01	00	10	Bagian Umum
12	24	06	04	01	00	11	Bagian Perlengkapan Dan Aset
12	24	06	04	01	00	12	Bagian Keuangan
12	24	06	05	00	00	00	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	24	06	05	01	00	00	SOPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	24	06	05	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	05	01	00	02	Bidang Sumber Daya Air
12	24	06	05	01	00	03	Bidang Bina Marga
12	24	06	05	01	00	04	Bidang Pengembangan Dan Permukiman, Penataan Bangunan, SPAM Dan PLP
12	24	06	05	01	00	05	Bidang Konstruksi
12	24	06	05	01	00	06	Bidang Tata Ruang
12	24	06	05	01	00	07	Bidang Peralatan Dan Pengujian Mutu
12	24	06	06	00	00	00	Perhubungan
12	24	06	06	01	00	00	SOPD Dinas Perhubungan
12	24	06	06	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	06	01	00	02	Bidang Lalu Lintas
12	24	06	06	01	00	03	Bidang Angkutan Dan Sarana
12	24	06	06	01	00	04	Bidang Prasarana
12	24	06	06	01	00	05	Bidang Pengembangan Dan Keselamatan
12	24	06	07	00	00	00	Kesehatan
12	24	06	07	01	00	00	SOPD Dinas Kesehatan
12	24	06	07	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	07	01	00	02	Bidang Kesehatan Masyarakat
12	24	06	07	01	00	03	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
12	24	06	07	01	00	04	Bidang Pelayanan Kesehatan
12	24	06	07	01	00	05	Bidang Sumber Daya Kesehatan
12	24	06	07	01	00	06	Puskesmas Pahandut
12	24	06	07	01	00	07	Pustu Dr Murjani
12	24	06	07	01	00	08	Pustu Tumbang Rungan
12	24	06	07	01	00	09	Pustu Rindang Banua
12	24	06	07	01	00	10	Pustu Pahandut Sebrang
12	24	06	07	01	00	11	Puskesmas Bukit Hindu
12	24	06	07	01	00	12	Pustu Pembatan
12	24	06	07	01	00	13	Pustu Mendawai
12	24	06	07	01	00	14	Pustu Bukit Tunggai
12	24	06	07	01	00	15	Pustu Bukit Raya
12	24	06	07	01	00	16	Puskesmas Menteng
12	24	06	07	01	00	17	Pustu Panahan
12	24	06	07	01	00	18	Pustu Palangka Permai
12	24	06	07	01	00	19	Pustu Kantor Gubernur
12	24	06	07	01	00	20	Pustu Amaco
12	24	06	07	01	00	21	Pustu Tunjung Nyahu
12	24	06	07	01	00	22	Pustu Bangas Permai
12	24	06	07	01	00	23	Puskesmas Panarung



Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	U r a i a n
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	07	01	00	24	Pustu Pinus
12	24	06	07	01	00	25	Pustu PCPR
12	24	06	07	01	00	26	Pustu Pengaringan I
12	24	06	07	01	00	27	Pustu Marina Permai
12	24	06	07	01	00	28	Pustu Pengaringan II
12	24	06	07	01	00	29	Pustu Flamboyan Baru
12	24	06	07	01	00	30	Pustu Flamboyan Bawah
12	24	06	07	01	00	31	Pustu Bukit Pinang
12	24	06	07	01	00	32	Pustu Bereng Bengkel
12	24	06	07	01	00	33	Pustu Kameloh Baru
12	24	06	07	01	00	34	Puskesmas Jekan Raya
12	24	06	07	01	00	35	Pustu km 10
12	24	06	07	01	00	36	Pustu Bumi Palangka II
12	24	06	07	01	00	37	Pustu km 7
12	24	06	07	01	00	38	Pustu Petuk Ketimpun
12	24	06	07	01	00	39	Puskesmas Kayon
12	24	06	07	01	00	40	Pustu Lestari
12	24	06	07	01	00	41	Pustu Perumnas
12	24	06	07	01	00	42	Pustu Pondok Cahaya Mas
12	24	06	07	01	00	43	Puskesmas Tangkiling
12	24	06	07	01	00	44	Pustu Trans Km. 38
12	24	06	07	01	00	45	Pustu Banturung
12	24	06	07	01	00	46	Pustu Tumbang Tahai
12	24	06	07	01	00	47	Pustu Nyaru Menteng
12	24	06	07	01	00	48	Pustu km 18 Aduiam
12	24	06	07	01	00	49	Pustu Habaring Hurung
12	24	06	07	01	00	50	Pustu Marang
12	24	06	07	01	00	51	Pustu Sei Gohong
12	24	06	07	01	00	52	Pustu Kanarakan
12	24	06	07	01	00	53	Puskesmas Rakumpit
12	24	06	07	01	00	54	Pustu Petuk Bukit
12	24	06	07	01	00	55	Pustu Panjehang
12	24	06	07	01	00	56	Pustu Gaung Baru
12	24	06	07	01	00	57	Pustu Petuk Berunai
12	24	06	07	01	00	58	Pustu Takaras
12	24	06	07	01	00	59	Pustu Bukit Sua
12	24	06	07	01	00	60	Puskesmas Kereng Bangkirai
12	24	06	08	00	00	00	Pendidikan
12	24	06	08	01	00	00	SOPD Dinas Pendidikan
12	24	06	08	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	08	01	00	02	Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal
12	24	06	08	01	00	03	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
12	24	06	08	01	00	04	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
12	24	06	08	01	00	05	Bidang Pembinaan Ketenagaan
12	24	06	08	01	00	06	Dinas Pendidikan cabang Pahandut
12	24	06	08	01	00	07	Dinas Pendidikan cabang Bukit Batu
12	24	06	08	01	00	08	TKN. Pembina Kecamatan. Pahandut
12	24	06	08	01	00	09	TKN. Satu Atap Tumbang Rungan
12	24	06	08	01	00	10	TKN. Pembina Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	11	TKN. Pembina Sabangau
12	24	06	08	01	00	12	TKN. Pembina Bukit Batu
12	24	06	08	01	00	13	TKN. Satu Atap Kanarakan
12	24	06	08	01	00	14	TKN. Pembina Rakumpit
12	24	06	08	01	00	15	SDN-1 Pahandut
12	24	06	08	01	00	16	SDN-2 Pahandut
12	24	06	08	01	00	17	SDN-3 Pahandut
12	24	06	08	01	00	18	SDN-4 Pahandut
12	24	06	08	01	00	19	SDN-5 Pahandut
12	24	06	08	01	00	20	SDN-6 Pahandut
12	24	06	08	01	00	21	SDN-7 Pahandut
12	24	06	08	01	00	22	SDN-8 Pahandut
12	24	06	08	01	00	23	SDN-1 Panarung
12	24	06	08	01	00	24	SDN-2 Panarung
12	24	06	08	01	00	25	SDN-3 Panarung
12	24	06	08	01	00	26	SDN-4 Panarung
12	24	06	08	01	00	27	SDN-5 Panarung
12	24	06	08	01	00	28	SDN-6 Panarung
12	24	06	08	01	00	29	SDN-7 Panarung
12	24	06	08	01	00	30	SDN-1 Langkai
12	24	06	08	01	00	31	SDN-2 Langkai
12	24	06	08	01	00	32	SDN-3 Langkai
12	24	06	08	01	00	33	SDN-4 Langkai
12	24	06	08	01	00	34	SDN-5 Langkai
12	24	06	08	01	00	35	SDN-6 Langkai
12	24	06	08	01	00	36	SDN-7 Langkai
12	24	06	08	01	00	37	SDN-8 Langkai
12	24	06	08	01	00	38	SDN-9 Langkai
12	24	06	08	01	00	39	SDN-10 Langkai
12	24	06	08	01	00	40	SDN-11 Langkai
12	24	06	08	01	00	41	SDN-12 Langkai
12	24	06	08	01	00	42	SDN-1 Tumbang Rungan
12	24	06	08	01	00	43	SDN-1 Tanjung Pinang
12	24	06	08	01	00	44	SDN-2 Tanjung Pinang
12	24	06	08	01	00	45	SDN-3 Tanjung Pinang



Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	U r a i a n
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	08	01	00	46	SDN-1 Pahandut Seberang
12	24	06	08	01	00	47	SDN-1 Palangka
12	24	06	08	01	00	48	SDN-3 Palangka
12	24	06	08	01	00	49	SDN-4 Palangka
12	24	06	08	01	00	50	SDN-5 Palangka
12	24	06	08	01	00	51	SDN-6 Palangka
12	24	06	08	01	00	52	SDN-7 Palangka
12	24	06	08	01	00	53	SDN-8 Palangka
12	24	06	08	01	00	54	SDN-9 Palangka
12	24	06	08	01	00	55	SDN-10 Palangka
12	24	06	08	01	00	56	SDN-11 Palangka
12	24	06	08	01	00	57	SDN-12 Palangka
12	24	06	08	01	00	58	SDN-13 Palangka
12	24	06	08	01	00	59	SDN-14 Palangka
12	24	06	08	01	00	60	SDN Percobaan
12	24	06	08	01	00	61	SDN-1 Menteng
12	24	06	08	01	00	62	SDN-2 Menteng
12	24	06	08	01	00	63	SDN-3 Menteng
12	24	06	08	01	00	64	SDN-4 Menteng
12	24	06	08	01	00	65	SDN-5 Menteng
12	24	06	08	01	00	66	SDN-6 Menteng
12	24	06	08	01	00	67	SDN-7 Menteng
12	24	06	08	01	00	68	SDN-8 Menteng
12	24	06	08	01	00	69	SDN-9 Menteng
12	24	06	08	01	00	70	SDN-1 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	71	SDN-2 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	72	SDN-3 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	73	SDN-4 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	74	SDN-5 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	75	SDN-6 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	76	SDN-7 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	77	SDN-8 Bukit Tunggai
12	24	06	08	01	00	78	SDN-1 Petuk Katimpun
12	24	06	08	01	00	79	SDN-2 Petuk Katimpun
12	24	06	08	01	00	80	SDN-3 Petuk Katimpun
12	24	06	08	01	00	81	SDN-1 Kameloh Baru
12	24	06	08	01	00	82	SDN-1 Bereng Bengkel
12	24	06	08	01	00	83	SDN-1 Kereng Bangkirai
12	24	06	08	01	00	84	SDN-2 Kereng Bangkirai
12	24	06	08	01	00	85	SDN-3 Kereng Bangkirai
12	24	06	08	01	00	86	SDN-1 Danau Tundai
12	24	06	08	01	00	87	SDN-1 Sabaru
12	24	06	08	01	00	88	SDN- 1 Kalampangan
12	24	06	08	01	00	89	SDN-1 Marang
12	24	06	08	01	00	90	SDN-2 Marang
12	24	06	08	01	00	91	SDN-1 Tumbang Tahai
12	24	06	08	01	00	92	SDN-2 Tumbang Tahai
12	24	06	08	01	00	93	SDN-3 Tumbang Tahai
12	24	06	08	01	00	94	SDN-1 Banturung
12	24	06	08	01	00	95	SDN-2 Banturung
12	24	06	08	01	00	96	SDN-1 Tangkiling
12	24	06	08	01	00	97	SDN-2 Tangkiling
12	24	06	08	01	00	98	SDN-3 Tangkiling
12	24	06	08	01	00	99	SDN-1 Kanarakan
12	24	06	08	01	00	100	SDN-1 Habaring Hurung
12	24	06	08	01	00	101	SDN-1 Sei Gohong
12	24	06	08	01	00	102	SDN-2 Sei Gohong
12	24	06	08	01	00	103	SDN-1 Petuk Bukit
12	24	06	08	01	00	104	SDN-2 Petuk Bukit
12	24	06	08	01	00	105	SDN-1 Panjehang
12	24	06	08	01	00	106	SDN-1 Petuk Barunai
12	24	06	08	01	00	107	SDN-2 Petuk Barunai
12	24	06	08	01	00	108	SDN-1 Mungku Baru
12	24	06	08	01	00	109	SDN-1 Pager Jaya
12	24	06	08	01	00	110	SDN-1 Gaung Baru
12	24	06	08	01	00	111	SDN-1 Bukit Sua
12	24	06	08	01	00	112	SMPN-1 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	113	SMPN-2 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	114	SMPN-6 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	115	SMPN-12 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	116	SMPN Satu Atap-7 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	117	SMPN Satu Atap-8 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	118	SMPN-3 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	119	SMPN-8 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	120	SMPN-9 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	121	SMPN-11 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	122	SMPN-14 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	123	SMPN-16 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	124	SMPN-4 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	125	SMPN-7 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	126	SMPN Satu Atap-3 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	127	SMPN Satu Atap-9 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	128	SMPN-5 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	129	SMPN-13 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	130	SMPN-15 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	131	SMPN Satu Atap-6 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	132	SMPN-10 Palangka Raya



Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	U r a i a n
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	08	01	00	133	SMPN Satu Atap-1 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	134	SMPN Satu Atap-2 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	135	SMPN Satu Atap-4 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	136	SMPN Satu Atap-5 Palangka Raya
12	24	06	08	01	00	137	SMP Terbuka Pahandut
12	24	06	08	01	00	138	SMP Terbuka Bukit Batu
12	24	06	09	00	00	00	Sosial
12	24	06	09	01	00	00	SOPD Dinas Sosial
12	24	06	09	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	09	01	00	02	Bidang Rehabilitasi Sosial
12	24	06	09	01	00	03	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
12	24	06	09	01	00	04	Bidang Pemberdayaan Sosial
12	24	06	09	01	00	05	Bidang Penanganan Fakir Miskin
12	24	06	10	00	00	00	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12	24	06	10	01	00	00	SOPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	24	06	10	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	10	01	00	02	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
12	24	06	10	01	00	03	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
12	24	06	10	01	00	04	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
12	24	06	10	01	00	05	Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan
12	24	06	11	00	00	00	Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12	24	06	11	01	00	00	SOPD Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12	24	06	11	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	11	01	00	02	Bidang Ketahanan Pangan
12	24	06	11	01	00	03	Bidang Tanaman Pangan Dan Holtikultura
12	24	06	11	01	00	04	Bidang Perkebunan
12	24	06	11	01	00	05	Bidang Prasarana Sarana Dan Penyuluhan Pertanian
12	24	06	11	01	00	06	Bidang Perbibitan Dan Produksi Ternak
12	24	06	11	01	00	06	Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran
12	24	06	12	00	00	00	Perindustrian Dan Perdagangan
12	24	06	12	01	00	00	SOPD Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
12	24	06	12	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	12	01	00	02	Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik Dan Aneka
12	24	06	12	01	00	03	Bidang Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan
12	24	06	12	01	00	04	Bidang Perdagangan
12	24	06	12	01	00	05	Bidang Sarana Distribusi Dan Logistik
12	24	06	13	00	00	00	Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
12	24	06	13	01	00	00	SOPD Dinas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
12	24	06	13	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	13	01	00	02	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan
12	24	06	13	01	00	03	Bidang Pelayanan
12	24	06	13	01	00	04	Bidang Penagihan
12	24	06	13	01	00	05	Bidang Pengawasan dan Pengendalian
12	24	06	14	00	00	00	Inspektorat
12	24	06	14	01	00	00	SOPD Inspektorat
12	24	06	14	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	14	01	00	02	Bidang Inspektur Pembantu Wilayah I
12	24	06	14	01	00	03	Inspektur Pembantu Wilayah II
12	24	06	14	01	00	04	Inspektur Pembantu Wilayah III
12	24	06	15	00	00	00	Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
12	24	06	15	01	00	00	SOPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	24	06	15	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	15	01	00	02	Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pengendalian
12	24	06	15	01	00	03	Bidang Sarana Dan Prasarana
12	24	06	15	01	00	04	Bidang Penyusunan Program
12	24	06	16	00	00	00	Lingkungan Hidup
12	24	06	16	01	00	00	SOPD Dinas Lingkungan Hidup
12	24	06	16	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	16	01	00	02	Bidang Penataan Dan Petaan Lingkungan Hidup



Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	U r a i a n
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	16	01	00	03	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Peningkatan Kapasitas
12	24	06	16	01	00	04	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
12	24	06	16	01	00	05	Bidang Konservasi Dan Bina Lingkungan
12	24	06	17	00	00	00	Kebudayaan Dan Pariwisata
12	24	06	17	01	00	00	SOPD Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
12	24	06	17	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	17	01	00	02	Bidang Kepariwisata
12	24	06	17	01	00	03	Bidang Kebudayaan
12	24	06	17	01	00	04	Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekraf
12	24	06	17	01	00	05	Bidang Pemasaran Pariwisata
12	24	06	18	00	00	00	Kesatuan Bangsa
12	24	06	18	01	00	00	SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	24	06	18	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	18	01	00	02	Bidang Kesatuan Ideologi Bangsa
12	24	06	18	01	00	03	Bidang Kewaspadaan
12	24	06	18	01	00	04	Bidang Politik dan Kemasyarakatan
12	24	06	18	01	00	05	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
12	24	06	19	00	00	00	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
12	24	06	19	01	00	00	SOPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
12	24	06	19	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	19	01	00	02	Bidang Perencanaan, Pembinaan Dan Pengembangan ASN
12	24	06	19	01	00	03	Bidang Mutasi Data Dan Sistem Informasi Kepegawaian
12	24	06	19	01	00	04	Bidang Pengelolaan Pendidikan Dan Pelatihan ASN
12	24	06	21	00	00	00	Perpustakaan Dan Kearsipan
12	24	06	21	01	00	00	SOPD Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
12	24	06	21	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	21	01	00	02	Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
12	24	06	21	01	00	03	Bidang Pengolahan Layanan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
12	24	06	21	01	00	04	Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan
12	24	06	21	01	00	05	Bidang Pengolahan Arsip
12	24	06	23	00	00	00	Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
12	24	06	23	01	00	00	SOPD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
12	24	06	23	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	23	01	00	02	Bidang Anggaran
12	24	06	23	01	00	03	Bidang Perbendaharaan
12	24	06	23	01	00	04	Bidang Akutansi
12	24	06	23	01	00	05	Bidang Pengelolaan Aset
12	24	06	24	00	00	00	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
12	24	06	24	01	00	00	SOPD Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
12	24	06	24	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	24	01	00	02	Bidang Pengembangan Prasarana Lingkungan Hidup
12	24	06	24	01	00	03	Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
12	24	06	24	01	00	04	Bidang Kebersihan
12	24	06	24	01	00	05	Bidang Penataan Dan Estetika Kota
12	24	06	25	00	00	00	Penanaman Modal Dan PTSP
12	24	06	25	01	00	00	SOPD Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
12	24	06	25	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	25	01	00	02	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal
12	24	06	25	01	00	03	Bidang Pergendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal
12	24	06	25	01	00	04	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
12	24	06	25	01	00	05	Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Laporan Layanan
12	24	06	26	00	00	00	Perikanan
12	24	06	26	01	00	00	SOPD Dinas Perikanan



Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	U r a i a n
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	26	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	26	01	00	02	Bidang Perikanan Budidaya
12	24	06	26	01	00	03	Bidang Perikanan Tangkap
12	24	06	26	01	00	04	Bidang Sarana Dan Prasarana Perikanan
12	24	06	26	01	00	05	Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Perikanan
12	24	06	27	00	00	00	Kepemudaan Dan Olah Raga
12	24	06	27	01	00	00	SOPD Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
12	24	06	27	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	27	01	00	02	Bidang Pemberdayaan Pemuda
12	24	06	27	01	00	03	Bidang Pengembangan Pemuda
12	24	06	27	01	00	04	Bidang Pemberdayaan Olah Raga
12	24	06	27	01	00	05	Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga
12	24	06	28	00	00	00	Pengendalian Penduduk Dan KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12	24	06	28	01	00	00	SOPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12	24	06	28	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	28	01	00	02	Bidang Pengendalian Penduduk
12	24	06	28	01	00	03	Bidang KB, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
12	24	06	28	01	00	04	Bidang Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan
12	24	06	28	01	00	05	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	24	06	28	01	00	06	Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak
12	24	06	29	00	00	00	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
12	24	06	29	01	00	00	SOPD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
12	24	06	29	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	29	01	00	02	Bidang Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas SDM
12	24	06	29	01	00	03	Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman
12	24	06	29	01	00	04	Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan
12	24	06	29	01	00	05	Bidang Sarana Dan Prasarana
12	24	06	30	00	00	00	Penelitian Dan Pengembangan
12	24	06	30	01	00	00	SOPD Badan Penelitian Dan Pengembangan
12	24	06	30	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	30	01	00	02	Bidang Sosial Dan Pemerintahan
12	24	06	30	01	00	03	Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
12	24	06	30	01	00	04	Bidang Inovasi Dan Teknologi
12	24	06	31	00	00	00	Rumah Sakit
12	24	06	31	01	00	00	SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
12	24	06	31	01	00	01	Sub Bagian Tata Usaha
12	24	06	31	01	00	02	Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis
12	24	06	31	01	00	03	Seksi Keperawatan
12	24	06	32	00	00	00	Satuan Polisi Pamong Praja
12	24	06	32	01	00	00	SOPD Satuan Polisi Pamong Praja
12	24	06	32	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	32	01	00	02	Bidang Pembinaan Masyarakat
12	24	06	32	01	00	03	Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
12	24	06	32	01	00	04	Bidang Penegakan Peraturan Daerah
12	24	06	32	01	00	05	Bidang Perlindungan Masyarakat
12	24	06	33	00	00	00	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
12	24	06	33	01	00	00	SOPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
12	24	06	33	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	33	01	00	02	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
12	24	06	33	01	00	03	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi
12	24	06	33	01	00	04	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
12	24	06	34	00	00	00	Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
12	24	06	34	01	00	00	SOPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
12	24	06	34	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	34	01	00	02	Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik



Kode Komponen pemilik Barang	Kode Provinsi	Kode Kota Palangka Raya	Kode Bidang	Kode Unit Bidang	Kode Tahun Pengadaan *	Kode Sub Unit	Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8
12	24	06	34	01	00	03	Bidang Penyelenggara E-Government
12	24	06	34	01	00	04	Bidang Layanan Komunikasi Dan Informatika
12	24	06	34	01	00	05	Bidang Persandian Dan Statistik
12	24	06	35	00	00	00	Tenaga Kerja
12	24	06	35	01	00	00	SOPD Dinas Tenaga Kerja
12	24	06	35	01	00	01	Sekretariat
12	24	06	35	01	00	02	Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas
12	24	06	35	01	00	03	Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
12	24	06	35	01	00	04	Bidang Hubungan Industrial Dan Jamsos, Ketenagakerjaan
12	24	06	50	00	00	00	Kecamatan
12	24	06	50	01	00	00	Kecamatan Pahandut
12	24	06	50	01	00	01	Sekretariat Kecamatan
12	24	06	50	01	00	02	Kelurahan Pahandut
12	24	06	50	01	00	03	Kelurahan Langkai
12	24	06	50	01	00	04	Kelurahan Panarung
12	24	06	50	01	00	05	Kelurahan Pahandut Seberang
12	24	06	50	01	00	06	Kelurahan Tanjung Pinang
12	24	06	50	01	00	07	Kelurahan Tumbang Rungan
12	24	06	50	02	00	00	Kecamatan Bukit Batu
12	24	06	50	02	00	01	Sekretariat Kecamatan
12	24	06	50	02	00	02	Kelurahan Marang
12	24	06	50	02	00	03	Kelurahan Tumbang Tahai
12	24	06	50	02	00	04	Kelurahan Habaring Hurung
12	24	06	50	02	00	05	Kelurahan Banturung
12	24	06	50	02	00	06	Kelurahan Tangkiling
12	24	06	50	02	00	07	Kelurahan Sei Gohong
12	24	06	50	02	00	08	Kelurahan Kanarakan
12	24	06	50	03	00	00	Kecamatan Jekan Raya
12	24	06	50	03	00	01	Sekretariat Kecamatan
12	24	06	50	03	00	02	Kelurahan Bukit Tunggal
12	24	06	50	03	00	03	Kelurahan Menteng
12	24	06	50	03	00	04	Kelurahan Palangka
12	24	06	50	03	00	05	Kelurahan Petuk Ketimpun
12	24	06	50	04	00	00	Kecamatan Sabangau
12	24	06	50	04	00	01	Sekretariat Kecamatan
12	24	06	50	04	00	02	Kelurahan Bereng Bengkel
12	24	06	50	04	00	03	Kelurahan Kameloh Baru
12	24	06	50	04	00	04	Kelurahan Kalampangan
12	24	06	50	04	00	05	Kelurahan Danau Tundai
12	24	06	50	04	00	06	Kelurahan Sabaru
12	24	06	50	04	00	07	Kelurahan Kereng Bangkirai
12	24	06	50	05	00	00	Kecamatan Rakumpit
12	24	06	50	05	00	01	Sekretariat Kecamatan
12	24	06	50	05	00	02	Kelurahan Mungku Baru
12	24	06	50	05	00	03	Kelurahan Bukit Sua
12	24	06	50	05	00	04	Kelurahan Petuk Barunai
12	24	06	50	05	00	05	Kelurahan Panjehang
12	24	06	50	05	00	06	Kelurahan Gaung Baru
12	24	06	50	05	00	07	Kelurahan Pager
12	24	06	50	05	00	08	Kelurahan Petuk Bukit

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	4
KA. SEKSI / Ka. SUB	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM		TGL
SEKDA		
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASUBAG		
PELAKSANA		

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA



Golongan	Bidang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-sub Kelompok	Barang Perolehan yang ke	Uraian
1	2	3	4	5	6	7
05	19	02	02	*	*	Tanaman Holtikultura
05	19	02	02	01	0000	Alpukat
05	19	02	02	02	0000	Apel
05	19	02	02	03	0000	Duku
05	19	02	02	04	0000	Durian
05	19	02	02	05	0000	Jambu
05	19	02	02	06	0000	Jeruk
05	19	02	02	07	0000	Mangga
05	19	02	02	08	0000	Rambutan
05	19	02	02	09	0000	Lain-lain
06	*	*	*	*	*	GOLONGAN KONSTRUKSI DLM Pengerjaan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

H.M RIBAN SATIA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KA. SEKSI / Ka. SUB	
PELAKSANA	

BAHAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASI/BAG	
PELAKSANA	

